

Konflik Pencemaran Lingkungan Tambak Udang PT Sinta Aqua Culture di Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur

Hamdi Asrori[✉]

Pendidikan Sosiologi, Universitas Hamzandwadi, Lombok Timur, Indonesia

✉ Corresponding author
hamdiasrori067@gmail.com

Received: 05-01-2026 | Revised: 20-01-2026 | Accepted: 10-02-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika konflik yang terjadi antara warga Desa Menceh dan PT Sinta Aqua Culture di Kabupaten Lombok Timur serta mengidentifikasi dampak yang ditimbulkannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertentangan berkembang melalui tiga fase, yaitu pra-konflik, pertentangan, dan konflik terbuka. Pemicu utama berasal dari persepsi warga terhadap penurunan kualitas ekosistem yang memengaruhi sumber daya alam dan keberlanjutan mata pencaharian. Situasi tersebut mendorong lahirnya resistensi kolektif sebagai upaya mempertahankan hak-hak ekologis. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perselisihan yang terjadi tidak hanya menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga meningkatkan kesadaran ekologis serta memperkuat solidaritas komunitas. Studi ini menegaskan bahwa persoalan ekologis di kawasan pesisir berkaitan erat dengan keadilan, partisipasi publik, dan tata kelola pembangunan yang berkelanjutan.

This study examines the conflict dynamics between the residents of Menceh Village and PT Sinta Aqua Culture in East Lombok Regency and explores its consequences for affected stakeholders. A qualitative approach with a descriptive case study design was employed. Data were gathered through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the dispute evolved through three phases: pre-conflict, confrontation, and open conflict. The primary trigger was the community's perception of ecological degradation affecting natural resources and local livelihoods. These conditions stimulated collective resistance aimed at defending ecological rights and communal interests. The study further reveals that the dispute generated social, economic, and political consequences while simultaneously fostering ecological awareness and strengthening community solidarity. The findings suggest that coastal ecological issues extend beyond biophysical concerns and are closely associated with justice, public participation, and sustainable development governance.

Kata kunci: konflik, pencemaran lingkungan, resistensi sosial, tambak udang

Pendahuluan

Pembangunan sektor perikanan budidaya merupakan salah satu strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan daya saing ekspor di kawasan pesisir. Di Indonesia, komoditas udang vaname berkembang menjadi subsektor unggulan karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan kontribusi signifikan terhadap devisa negara. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa udang merupakan komoditas ekspor perikanan utama Indonesia dengan tren produksi yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023). Peningkatan produksi tersebut mendorong ekspansi industri tambak udang ke berbagai wilayah



pesisir, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi udang nasional (Andita, 2023). Meskipun perkembangan ini membuka peluang ekonomi baru, industrialisasi akuakultur juga menghadirkan tantangan sosial dan ekologis yang tidak sederhana.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, keberhasilan suatu aktivitas ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. Berbagai studi menunjukkan bahwa ekspansi industri akuakultur yang tidak diikuti dengan pengelolaan lingkungan yang memadai berpotensi menimbulkan pencemaran perairan, penurunan kualitas ekosistem pesisir, serta konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal (Sintawati dkk., 2024; Isman dkk., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan perlindungan lingkungan dan partisipasi masyarakat dengan praktik di lapangan yang sering kali lebih berorientasi pada peningkatan produksi dan keuntungan ekonomi. Akibatnya, persoalan pencemaran lingkungan tidak lagi dipahami semata sebagai masalah teknis pengelolaan limbah, melainkan sebagai isu sosial yang berkaitan dengan distribusi manfaat, beban lingkungan, dan relasi kekuasaan di masyarakat.

Kesenjangan antara idealitas kebijakan dan realitas implementasi terlihat dalam kasus tambak udang PT Sinta Aqua Culture di Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Kehadiran perusahaan yang mulai beroperasi pada tahun 2021 pada awalnya dipandang sebagai peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Namun, dalam perkembangannya muncul berbagai keluhan terkait dugaan pencemaran lingkungan, perubahan kualitas air, terganggunya aktivitas pertanian dan perikanan, serta perdebatan mengenai aspek perizinan dan pengelolaan lingkungan perusahaan (Syafuruddin, 2024). Situasi ini kemudian berkembang menjadi konflik sosial yang melibatkan masyarakat, perusahaan, dan pemerintah desa. Konflik tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan di wilayah pesisir tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik lokal yang membentuk hubungan antaraktor.

Secara teoretis, konflik lingkungan dapat dipahami melalui perspektif sosiologi konflik dan resistensi. Karl Marx memandang konflik sebagai konsekuensi dari ketimpangan kepemilikan sumber daya dan dominasi kelompok yang memiliki modal terhadap kelompok yang memiliki posisi lebih lemah dalam struktur sosial (Wirawan, 2015). Dalam konteks industri tambak udang, pemilik modal memiliki kemampuan lebih besar dalam mengakses lahan, teknologi, dan jaringan ekonomi, sementara masyarakat lokal sering berada pada posisi yang lebih rentan terhadap dampak lingkungan. Di sisi lain, James C. Scott melihat konflik sebagai bentuk resistensi kelompok subordinat terhadap praktik dominasi yang dianggap merugikan kepentingan mereka (Susilowati & Indarti, 2018). Perspektif Scott penting karena menunjukkan bahwa perlawanan masyarakat tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan, tetapi dapat berkembang melalui berbagai bentuk resistensi terbuka maupun tersembunyi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji konflik yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah pesisir dan aktivitas tambak udang. Rachmawati (2015) menyoroti konflik penggunaan lahan di kawasan pesisir yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan dengan latar belakang perebutan ruang dan sumber daya. Asef (2023) menunjukkan pentingnya resolusi konflik sosial-ekologis melalui mekanisme dialog antara masyarakat dan perusahaan tambak udang. Farhan (2017) menemukan bahwa kapasitas negara dalam menyelesaikan konflik tambak udang sering kali bersifat formalistik dan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan di tingkat masyarakat. Basri (2025) menunjukkan bahwa pencemaran limbah tambak udang

berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan mata pencaharian lokal. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan aspek resolusi konflik, kapasitas kelembagaan, dampak lingkungan, atau penggunaan lahan, sementara kajian yang secara khusus menelusuri dinamika konflik dari tahap awal hingga bentuk resistensi masyarakat akibat pencemaran lingkungan masih relatif terbatas.

Berdasarkan telaah tersebut, penelitian ini menempati posisi yang berbeda dengan menitikberatkan analisis pada dinamika konflik dan dampak sosial yang muncul akibat dugaan pencemaran lingkungan oleh tambak udang PT Sinta Aqua Culture. Fokus penelitian tidak hanya diarahkan pada identifikasi faktor penyebab konflik, tetapi juga pada proses berkembangnya konflik dari tahap pra-konflik, pertentangan, hingga konflik terbuka yang ditandai dengan munculnya aksi-aksi perlawanan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana konflik lingkungan terbentuk, berkembang, dan memengaruhi hubungan sosial antaraktor yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi konflik, sosiologi lingkungan, dan studi pembangunan pesisir melalui penyajian bukti empiris mengenai hubungan antara pencemaran lingkungan, ketimpangan kekuasaan, dan resistensi masyarakat lokal.

Atas dasar argumentasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar tambak udang PT Sinta Aqua Culture serta mengkaji dampak sosial yang ditimbulkan bagi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah desa. Pertanyaan penelitian yang diajukan berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana konflik lingkungan berkembang dalam konteks masyarakat pesisir yang sedang mengalami perubahan sosial-ekonomi akibat masuknya investasi industri akuakultur. Temuan penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi konflik sosial-ekologis, tetapi juga menghasilkan rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam merancang model pengelolaan sumber daya pesisir yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif untuk memahami secara mendalam dinamika konflik pencemaran lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tambak udang PT Sinta Aqua Culture di Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat melalui pengungkapan makna, pengalaman, persepsi, serta interaksi sosial para aktor yang terlibat dalam konflik (Moleong, 2018; Suhirman et al., 2026). Fokus penelitian diarahkan pada proses terbentuknya konflik, bentuk-bentuk resistensi masyarakat, serta dampak sosial yang muncul akibat dugaan pencemaran lingkungan. Penelitian dilaksanakan di Desa Menceh pada periode April hingga Mei 2025, sementara tahapan persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan penelitian berlangsung sejak Januari hingga Juli 2025. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama (human instrument) yang berperan secara langsung dalam mengamati fenomena, membangun relasi dengan informan, menginterpretasikan data, serta memahami konteks sosial yang berkembang di lapangan (Sugiyono, 2017; Suhirman dkk, 2026). Kehadiran peneliti secara langsung di lokasi penelitian memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman masyarakat yang terdampak konflik dan dinamika hubungan antara masyarakat, perusahaan, serta pemerintah desa dalam konteks pencemaran lingkungan.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan informan terhadap konflik yang terjadi. Informan penelitian terdiri atas masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas tambak udang, tokoh pemuda, aparat pemerintah desa, akademisi, nelayan, petani, serta pihak-pihak lain yang memahami perkembangan konflik di Desa Menceh. Data penelitian diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Observasi partisipatif dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi lingkungan dan dinamika sosial masyarakat di sekitar kawasan tambak udang. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, pengetahuan, dan interpretasi informan mengenai penyebab, proses, serta dampak konflik yang terjadi. Sementara itu, dokumentasi berupa foto lapangan, arsip, berita media, dokumen kesepakatan masyarakat, serta berbagai dokumen pendukung lainnya dimanfaatkan sebagai sumber data pelengkap guna memperkuat hasil observasi dan wawancara. Kombinasi berbagai teknik pengumpulan data tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya, mendalam, dan kontekstual sehingga mampu menggambarkan realitas konflik secara lebih komprehensif sesuai karakteristik penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017; Suhirman dkk, 2026).

Analisis data dilakukan secara berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai dengan mengacu pada model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Pada tahap reduksi, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, diklasifikasikan, serta difokuskan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan identifikasi pola hubungan antaraktor, dinamika konflik, serta bentuk-bentuk resistensi masyarakat yang muncul. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi secara terus-menerus agar interpretasi yang dihasilkan tetap konsisten dengan data empiris yang ditemukan di lapangan. Untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan temuan penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap fenomena yang sama (Sugiyono, 2012). Melalui prosedur tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, serta mampu merepresentasikan secara akurat realitas konflik pencemaran lingkungan yang berkembang di Desa Menceh (Moleong, 2018; Suhirman dkk., 2026).

Hasil Penelitian/Result

Dinamika Konflik Pencemaran Lingkungan antara Masyarakat dan PT Sinta Aqua Culture

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik antara masyarakat Desa Menceh dan PT Sinta Aqua Culture tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui proses sosial yang berlangsung secara bertahap. Konflik berakar pada perbedaan kepentingan antara masyarakat yang menginginkan lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan dengan perusahaan yang berorientasi pada keberlangsungan aktivitas produksi tambak udang. Pada awal operasional perusahaan, sebagian masyarakat memandang keberadaan tambak udang sebagai peluang ekonomi yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan aktivitas ekonomi desa. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai perubahan lingkungan yang mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti menurunnya kualitas air, terganggunya produktivitas

lahan pertanian, serta berkurangnya hasil tangkapan nelayan. Kondisi tersebut memunculkan ketidakpuasan yang perlahan berkembang menjadi konflik sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, dinamika konflik berlangsung melalui tiga tahapan utama, yaitu pra-konflik, pertentangan, dan konflik terbuka. Pada tahap pra-konflik, ketegangan masih bersifat laten dan belum diekspresikan secara terbuka oleh masyarakat. Meskipun berbagai indikasi kerusakan lingkungan mulai dirasakan, masyarakat masih berupaya memahami situasi yang terjadi dan berharap adanya perbaikan dari pihak perusahaan. Pada fase ini, ketidakpuasan berkembang dalam ruang-ruang percakapan informal antarwarga dan belum terorganisasi menjadi tindakan kolektif. Dengan kata lain, konflik masih berada pada level kesadaran individual yang belum berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih luas.

Perkembangan konflik memasuki tahap pertentangan ketika masyarakat mulai mengaitkan berbagai perubahan lingkungan yang terjadi dengan aktivitas tambak udang. Kesadaran tersebut mendorong munculnya berbagai bentuk keberatan yang disampaikan kepada perusahaan maupun pemerintah desa. Pada fase ini, masyarakat tidak lagi memandang persoalan yang terjadi sebagai masalah individual, melainkan sebagai persoalan kolektif yang berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Meningkatnya intensitas komunikasi antarmasyarakat menyebabkan terbentuknya kesadaran bersama mengenai pentingnya memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat. Kesadaran kolektif tersebut menjadi faktor penting yang mendorong terjadinya eskalasi konflik. Tahap konflik terbuka ditandai dengan munculnya berbagai tindakan nyata yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk protes terhadap kondisi yang mereka alami. Pada fase ini, masyarakat mulai melakukan aksi kolektif untuk menyuarakan tuntutan mereka kepada perusahaan dan pihak-pihak terkait. Konflik tidak lagi berada pada level perbedaan pandangan, tetapi telah berkembang menjadi perjuangan terbuka untuk memperoleh keadilan lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik lingkungan merupakan proses sosial yang berkembang secara bertahap sebagai respons terhadap akumulasi ketidakpuasan yang tidak memperoleh penyelesaian yang dianggap memadai oleh masyarakat.

Resistensi Masyarakat sebagai Bentuk Perjuangan atas Keadilan Lingkungan

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah munculnya resistensi masyarakat sebagai respons terhadap perubahan lingkungan yang dianggap merugikan kehidupan mereka. Resistensi tersebut lahir dari pengalaman masyarakat yang merasakan secara langsung dampak aktivitas tambak udang terhadap sumber daya yang selama ini menjadi basis kehidupan ekonomi mereka. Bagi masyarakat pesisir, lingkungan bukan hanya ruang fisik tempat tinggal, tetapi juga sumber penghidupan yang menentukan keberlangsungan kehidupan keluarga dan komunitas. Ketika kualitas lingkungan mengalami penurunan, masyarakat memandang kondisi tersebut sebagai ancaman terhadap keberlanjutan hidup mereka. Pada tahap awal, resistensi masyarakat muncul dalam bentuk yang relatif sederhana, seperti penyampaian keluhan, diskusi antarwarga, dan upaya meminta klarifikasi mengenai aktivitas perusahaan. Akan tetapi, ketika berbagai keluhan tersebut tidak menghasilkan perubahan yang signifikan, bentuk resistensi berkembang menjadi tindakan yang lebih terbuka. Masyarakat mulai membangun solidaritas, mengorganisasi diri, dan menyusun strategi bersama untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Proses ini menunjukkan bahwa resistensi tidak hanya merupakan bentuk penolakan terhadap suatu kondisi, tetapi juga merupakan upaya membangun kekuatan kolektif untuk menghadapi relasi kekuasaan yang dianggap tidak seimbang.

Perlawanan yang dilakukan masyarakat menunjukkan adanya transformasi dari ketidakpuasan individual menuju gerakan sosial yang lebih terorganisasi. Kesadaran bahwa persoalan lingkungan merupakan masalah bersama mendorong masyarakat untuk mengesampingkan perbedaan-perbedaan internal dan membangun solidaritas dalam memperjuangkan tujuan yang sama. Dalam proses tersebut, konflik berfungsi sebagai mekanisme yang memperkuat identitas kolektif masyarakat terdampak. Mereka tidak lagi melihat diri sebagai individu yang mengalami kerugian secara terpisah, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang memiliki kepentingan bersama untuk mempertahankan kualitas lingkungan dan sumber penghidupan. Menariknya, resistensi yang muncul tidak hanya menghasilkan tekanan terhadap perusahaan, tetapi juga mendorong terbentuknya ruang-ruang partisipasi baru di tingkat masyarakat. Konflik membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam isu-isu lingkungan yang sebelumnya jarang menjadi perhatian bersama. Dengan demikian, resistensi masyarakat tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap pencemaran lingkungan, tetapi juga sebagai proses pembelajaran sosial yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak ekologis mereka.

Dampak Konflik terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi, dan Politik Lokal

Konflik pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Menceh menghasilkan dampak yang kompleks dan multidimensional. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang terdampak secara langsung, tetapi juga memengaruhi hubungan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah desa. Dalam aspek sosial, konflik menciptakan perubahan pola hubungan antaraktor yang sebelumnya berjalan relatif harmonis. Ketegangan yang muncul menyebabkan meningkatnya sikap kritis masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan aktivitas yang dianggap berpotensi mengancam kepentingan mereka. Konflik juga mengubah cara masyarakat memandang keberadaan perusahaan, dari yang semula dipersepsikan sebagai peluang ekonomi menjadi sumber persoalan lingkungan yang perlu diawasi secara lebih ketat.

Dalam aspek ekonomi, masyarakat mengalami berbagai kerugian yang berkaitan dengan menurunnya kualitas sumber daya alam yang menjadi basis mata pencaharian mereka. Nelayan menghadapi penurunan hasil tangkapan akibat perubahan kondisi ekosistem pesisir, sementara petani mengalami gangguan terhadap produktivitas lahan yang berada di sekitar kawasan tambak. Penurunan kualitas lingkungan pada akhirnya berimplikasi terhadap berkurangnya pendapatan rumah tangga dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi masyarakat. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa dampak pencemaran lingkungan tidak hanya terbatas pada aspek ekologis, tetapi juga memiliki konsekuensi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi politik lokal, konflik memunculkan tantangan bagi pemerintah desa sebagai institusi yang berada paling dekat dengan masyarakat. Sebagian masyarakat menilai bahwa pemerintah desa belum mampu menjalankan fungsi mediasi secara optimal sehingga muncul penurunan tingkat kepercayaan terhadap institusi lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik lingkungan tidak hanya berkaitan dengan hubungan masyarakat dan perusahaan, tetapi juga menyangkut legitimasi institusi yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan kepentingan berbagai pihak. Ketika ekspektasi masyarakat tidak terpenuhi, hubungan antara masyarakat dan pemerintah menjadi lebih rentan terhadap ketegangan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa konflik menghasilkan sejumlah dampak konstruktif. Konflik meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong partisipasi yang lebih besar dalam berbagai isu publik. Konflik juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk membangun

kesadaran kritis terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara. Dengan demikian, konflik pencemaran lingkungan di Desa Menceh tidak hanya menghasilkan ketegangan dan kerugian sosial, tetapi juga menjadi katalisator perubahan sosial yang mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif, solidaritas komunitas, dan tuntutan terhadap tata kelola lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik pencemaran lingkungan di Desa Menceh tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis pengelolaan limbah atau dampak ekologis dari aktivitas tambak udang. Konflik yang terjadi sesungguhnya merepresentasikan pertarungan kepentingan antara orientasi pertumbuhan ekonomi yang dibawa oleh investasi industri akuakultur dengan kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan kualitas lingkungan dan keberlanjutan sumber penghidupan mereka. Dalam konteks ini, lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekologis, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memiliki nilai ekonomi, budaya, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir. Ketika masyarakat mulai merasakan bahwa kualitas lingkungan mengalami penurunan dan berdampak pada kehidupan sehari-hari, maka persoalan lingkungan bertransformasi menjadi persoalan sosial yang melibatkan tuntutan keadilan, distribusi manfaat pembangunan, serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal. Dengan demikian, konflik yang terjadi di Desa Menceh memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak diiringi dengan pengelolaan lingkungan yang memadai berpotensi menghasilkan ketegangan sosial yang berkepanjangan.

Dari perspektif teori konflik Karl Marx, temuan penelitian ini memperlihatkan adanya relasi yang tidak seimbang antara pemilik modal dan masyarakat terdampak. Marx memandang bahwa konflik muncul akibat ketimpangan penguasaan sumber daya dan perbedaan kepentingan antara kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dengan kelompok yang berada pada posisi yang lebih rentan (Wirawan, 2015). Dalam kasus ini, perusahaan tambak udang memiliki akses terhadap modal, teknologi, dan instrumen produksi yang memungkinkan mereka mengelola sumber daya pesisir untuk kepentingan ekonomi. Sebaliknya, masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap lingkungan sebagai sumber penghidupan. Ketika aktivitas produksi perusahaan dianggap mengganggu keberlanjutan sumber daya tersebut, maka konflik menjadi tidak terhindarkan. Temuan ini memperkuat argumentasi Marx bahwa konflik sosial sering kali berakar pada distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak seimbang, sehingga kelompok yang merasa dirugikan akan berupaya melakukan perlawanan untuk mempertahankan kepentingannya.

Lebih jauh, dinamika konflik yang berkembang melalui tahapan pra-konflik, pertentangan, hingga konflik terbuka menunjukkan bahwa konflik lingkungan merupakan proses sosial yang bersifat gradual. Konflik tidak muncul secara instan, melainkan diawali oleh akumulasi ketidakpuasan yang berkembang dalam jangka waktu tertentu. Temuan ini memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kerusakan lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran kolektif. Ketika masyarakat mulai menghubungkan perubahan kualitas lingkungan dengan aktivitas perusahaan, terbentuklah pemahaman bersama mengenai sumber masalah yang mereka hadapi. Proses pembentukan kesadaran tersebut menjadi titik awal lahirnya tindakan kolektif. Dalam konteks sosiologi lingkungan, kondisi ini menunjukkan bahwa pengalaman bersama atas risiko lingkungan dapat menjadi faktor yang mempersatukan masyarakat dalam suatu gerakan sosial yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan keadilan ekologis.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa resistensi masyarakat berkembang dari bentuk-bentuk perlawanan yang bersifat informal menuju perlawanan terbuka yang dilakukan secara kolektif. Fenomena ini sejalan dengan konsep resistensi James C. Scott yang membedakan antara hidden transcript dan public transcript (Susilowati & Indarti, 2018). Pada tahap awal, masyarakat mengekspresikan ketidakpuasan melalui percakapan sehari-hari, keluhan, dan berbagai bentuk kritik yang belum terlihat secara terbuka. Namun ketika saluran komunikasi yang tersedia dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan yang ada, resistensi berkembang menjadi aksi kolektif yang lebih nyata. Temuan ini mengindikasikan bahwa perlawanan masyarakat bukanlah tindakan yang muncul secara spontan, melainkan hasil dari proses refleksi sosial yang panjang. Resistensi yang dilakukan masyarakat Desa Menceh dapat dipahami sebagai upaya memperoleh pengakuan atas hak-hak ekologis mereka sekaligus bentuk kritik terhadap praktik pembangunan yang dianggap kurang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memperlihatkan sejumlah kesamaan sekaligus perbedaan yang penting. Temuan penelitian mendukung hasil studi Rachmawati (2015) yang menunjukkan bahwa konflik di wilayah pesisir umumnya berakar pada perebutan ruang dan sumber daya antara berbagai kelompok kepentingan. Penelitian ini juga sejalan dengan temuan Asef (2023) yang menegaskan bahwa konflik sosial-ekologis pada kawasan tambak udang muncul karena adanya ketidaksesuaian antara kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat lokal. Akan tetapi, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik dengan menunjukkan bagaimana konflik berkembang melalui tahapan-tahapan sosial tertentu hingga menghasilkan bentuk resistensi terbuka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan penyebab konflik, tetapi juga menjelaskan proses sosial yang membentuk konflik tersebut dari fase laten hingga fase manifest.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa konflik tidak selalu menghasilkan konsekuensi negatif. Di satu sisi, konflik memang menimbulkan kerugian ekonomi, ketegangan sosial, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi lokal. Akan tetapi, di sisi lain, konflik justru menjadi katalisator yang mendorong lahirnya kesadaran lingkungan, solidaritas sosial, dan partisipasi masyarakat yang lebih kuat. Temuan ini memperkuat pandangan teori konflik modern yang menyatakan bahwa konflik dapat memiliki fungsi konstruktif dalam kehidupan sosial. Konflik mendorong masyarakat untuk membangun jaringan solidaritas, meningkatkan kapasitas kolektif, serta memperluas keterlibatan mereka dalam berbagai isu publik. Dalam konteks Desa Menceh, konflik telah mengubah masyarakat dari posisi yang pasif menjadi lebih aktif dalam mengawasi dan mengkritisi berbagai aktivitas yang berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan mereka.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengelolaan kawasan pesisir dan industri akuakultur di Indonesia. Konflik yang terjadi menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya berdasarkan peningkatan produksi atau keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan mekanisme komunikasi yang lebih partisipatif dengan masyarakat, meningkatkan transparansi pengelolaan lingkungan, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas usaha. Pemerintah daerah dan pemerintah desa juga perlu memperkuat fungsi pengawasan dan mediasi agar potensi konflik dapat diidentifikasi sejak dini sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Dengan kata lain, pendekatan pembangunan yang inklusif

dan partisipatif menjadi syarat penting untuk mencegah munculnya konflik sosial-ekologis di kawasan pesisir.

Meskipun penelitian ini berhasil menjelaskan dinamika konflik, bentuk resistensi masyarakat, dan dampak yang ditimbulkan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini berfokus pada satu kasus konflik di Desa Menceh sehingga generalisasi temuan ke wilayah lain perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, penelitian lebih banyak menyoroti perspektif masyarakat terdampak sehingga belum sepenuhnya menggambarkan pandangan perusahaan dan aktor kebijakan pada tingkat yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pendekatan komparatif dengan melibatkan berbagai lokasi konflik lingkungan di kawasan pesisir untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola konflik sosial-ekologis di Indonesia. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas mekanisme penyelesaian konflik berbasis partisipasi masyarakat sebagai upaya membangun tata kelola lingkungan yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pencemaran lingkungan yang terjadi antara masyarakat Desa Menceh dan PT Sinta Aqua Culture merupakan konflik sosial-ekologis yang berakar pada ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan kualitas lingkungan serta keberlanjutan sumber penghidupan mereka. Dinamika konflik berkembang secara bertahap melalui fase pra-konflik, pertentangan, hingga konflik terbuka yang ditandai dengan munculnya berbagai bentuk resistensi masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa konflik lingkungan tidak muncul secara spontan, melainkan merupakan hasil dari akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap dampak aktivitas industri yang dipersepsikan mengganggu kondisi ekologis dan sosial di wilayah mereka. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa resistensi masyarakat merupakan bentuk perjuangan untuk memperoleh keadilan lingkungan dan pengakuan atas hak-hak ekologis yang mereka miliki. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menjawab tujuan penelitian mengenai dinamika konflik pencemaran lingkungan sekaligus memperlihatkan bagaimana konflik berkembang menjadi gerakan kolektif masyarakat dalam merespons perubahan lingkungan yang mereka alami.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konflik memberikan dampak yang bersifat multidimensional bagi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah desa. Di satu sisi, konflik menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang tercermin dari terganggunya mata pencaharian masyarakat, munculnya ketegangan sosial, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi lokal. Namun di sisi lain, konflik juga menghasilkan dampak konstruktif berupa meningkatnya kesadaran lingkungan, menguatnya solidaritas sosial, dan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Temuan tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi konflik dan sosiologi lingkungan dengan menunjukkan bahwa konflik sosial-ekologis tidak hanya merefleksikan pertentangan kepentingan, tetapi juga dapat menjadi sarana transformasi sosial dan penguatan kapasitas kolektif masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan industri berbasis sumber daya alam perlu dilakukan secara lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan agar potensi konflik dapat diminimalkan serta hubungan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dapat terbangun secara lebih harmonis dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Ady, T. D. (2021). 7 poin penting pengaturan AMDAL dalam UU Cipta Kerja. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com>
- Aji, J. M. M., & Supriono, A. (2018). Analisis komparatif usaha budidaya udang vaname tambak tradisional dengan tambak intensif di Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 2(4), 255–266.
- Andita. (2023, June 20). Tahun lalu, produksi udang vaname NTB tembus 180,5 ribu ton. *Lombok Post*. <https://lombokpost.jawapos.com>
- Banun, S., Arthana, W., & Suarna, W. (2008). Kajian ekologis pengelolaan tambak udang di Dusun Daging Marga Desa Delodbrawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Bali. *Ecotrophic*, 3(1).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2024). Produksi dan nilai produksi perikanan budidaya menurut kabupaten/kota dan komoditas utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. <https://ntb.bps.go.id>
- Hijriani, P. R. (2018). Program minapolitan pada perkembangan perikanan tambak di Kabupaten Sidoarjo tahun 2005–2015. *Avatara E-Journal Pendidikan Sejarah*, 6(1), 157–165.
- Ismail, S. W., Ika, F., & Maryadi. (2019). *Metode penelitian sosial*. Gawe Buku.
- Isman, H., Rupiwardani, I., & Sari, D. (2022). Gambaran pencemaran limbah cair industri tambak udang terhadap kualitas air laut di pesisir Pantai Lombeng. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 3531–3541.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023, December 7). KKP siap berkolaborasi dengan K/L lain genjot produksi udang di 2024. <https://kkp.go.id>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muzakkar, A., & Latif, A. (2025). *Sosiologi: Dari teori ke realitas sosial*. Universitas Hamzanwadi Press.
- Parenrengi, A. P. (2019). *Konflik keberadaan PT Bosowa Semen dengan masyarakat Desa Tukamasea Kabupaten Maros (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar)*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. (1999). <https://jdih.setkab.go.id>
- Purnamasari, I., Purnama, D., & Utami, M. A. F. (2017). Pertumbuhan udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) di tambak intensif. *Jurnal Enggano*, 2(1), 58–67.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Senoaji, F. P. (2023). *Dinamika konflik di kawasan lindung: Studi tentang konflik penguasaan lahan tambak udang di sekitar Bandara YIA Kulon Progo tahun 2011–2021 (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)*.
- Sintawati, D., Zuhairo, H., Latifah, N. N., & Rahayu, R. (2024). Analisis dampak tambak udang pada ekosistem laut di Kebumen. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 5(1), 109–113.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhirman, L., Nugroho, A. Y., Dhyanaputri, I. G. A. S., Adawiyah, R., Soraya, A., Dzaky, M. I., Alunaza, H., Akbar, S. A., Hafizi, M. Z., & Junida, D. S. (2026). *Dasar metodologi penelitian*. CV. Askara Sastra Media.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Susilowati, E. Z., & Indarti, T. (2018). *Resistensi perempuan dalam kumpulan cerita Tandak karya Royyan Julian (Teori resistensi James C. Scott)*. Universitas Negeri Surabaya.

- Syafruddin. (2024, September 30). ALGEM30s gedor Pemda Lotim tinjau keberadaan tambak udang di Dusun Seliat. Indonesia Satu. <https://www.indonesiasatu.co.id>
- Vanessa. (2021, May 15). Sorot daerah udang tinggi Nusa Tenggara Barat. Jala. <https://jala.tech>
- Vanessa. (2024, June 28). Ranking Indonesia di peta persaingan eksportir udang dunia. Jala. <https://jala.tech>
- Wirawan, I. B. (2015). Teori-teori sosial dalam tiga paradigma: Fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial (Cetakan ke-34). Prenadamedia Group.